

**ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
KETUT MEIRA SARI DEWI
NIM. 1915613107**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ketut Meira Sari Dewi
NIM : 1915613107
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Keuangan Pada
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Buleleng
Pembimbing : 1. I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.
2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb. Ak.
Tanggal Uji : 20 Desember 2022

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 05 Desember 2022



(Ketut Meira Sari Dewi)

NIM. 1915613107

**ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG**

OLEH:

KETUT MEIRA SARI DEWI

NIM. 1915613107

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III

Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


I Made Bagrada, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003


Ni Made Wirasyanti Dwi P., S.E., M.Agb. Ak.
NIP. 198101152006042002

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 20 Desember 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003

ANGGOTA:

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si.
NIP. 196012311990031018



3. I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb. Ak. selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi
4. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb. Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
5. Bapak I Nyoman Sutarna S.Pd. M.Pd dan Ibu Ni Made Sudarmi S.Pd selaku orang tua yang tercinta dan terkasih yang selalu mendukung dan menguatkan penulis untuk terus menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini.

6. Teruntuk kakak-kakak dan adik tercinta yang selalu setia memberi dukungan dan semangat.
7. Bapak Made Astika, S.Pd, M.M selaku kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
8. Ibu Luh Putu Anggia Dewi, S.E selaku Kasubag Umum dan Keuangan.
9. Serta kepada para Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
10. Teruntuk teman-teman terkasih yang selalu mendukung dan member semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 05 Desember 2022

Penulis

**ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG**

ABSTRAK

Ketut Meira Sari Dewi

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Adapun bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran pada pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan analisis metode wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Terdapat struktur organisasi yang jelas menerapkan wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen, proses penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan kantor selama satu (1) tahun, tidak ada pemisahan biaya terkendali ataupun tidak terkendali karena pada sistem pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah menginput biaya sesuai dengan kebutuhan dari operasional, adanya klasifikasi kode rekening, serta sistem pelaporan biaya sebagai syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Kata Kunci : akuntansi pertanggungjawaban, penyusunan anggaran, biaya terkendali dan tidak terkendali, anggaran

**FINANCIAL ACCOUNTABILITY ACCOUNTING ANALYSIS AT THE
DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS,
BULELENG REGENCY**

ABSTRACT

Ketut Meira Sari Dewi

This research was conducted at the Department of Education, Youth and Sports, Buleleng Regency. The aim is to find out how to implement Accountability Accounting as a budget control tool in local governments. This research is a qualitative research using qualitative descriptive analysis method. Methods of collecting data using the analysis of the interview method. Based on the results of the analysis carried out using descriptive analysis, it can be concluded that the Office of Education, Youth and Sports of Buleleng Regency has implemented accountability accounting. There is a clear organizational structure that implements the authority and responsibility of each level of management, the budgeting process refers to the office activity plan for one (1) year, there is no separation of controlled or uncontrolled costs because the reporting system of the Youth and Sports Education Office has inputted costs according to operational needs. , the existence of a classification of account codes, as well as a cost reporting system as a requirement for the application of accountability accounting.

Keywords: Accountability Accounting, Budgeting, Controlled and Uncontrolled Costs, Budget

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN DAN DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori <i>Good Governance</i>	8
2.1.2 Teori Desentralisasi.....	9
2.1.3 Akuntansi Pertanggungjawaban	9
2.1.4 Indikator Akuntansi Pertanggungjawaban	10
2.1.5 Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.2. Penelitian Terdahulu.....	15
2.3. Kerangka Berpikir Penelitian	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian.....	26

3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Metode Pengumpulan Data	27
3.5. Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	28
3.5.1 Metode Pengolahan	28
3.5.2 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	30
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.1.1 Profil Kantor.....	30
4.1.2 Visi dan Misi	30
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	31
4.1.4 Susunan Organisasi Kantor	33
4.1.5 Struktur Organisasi.....	33
4.2. Hasil Analisis Penelitian	56
4.2.1 Penyusunan Anggaran.....	56
4.2.2 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali	57
4.2.3 Klasifikasi Kode Rekening.....	57
4.2.4 Sistem Pelaporan Biaya.....	59
4.2.5 Akuntansi Pertanggungjawaban Kantor	60
4.3. Pembahasan Penelitian	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Klasifikasi Kode Rekening	58
Tabel 4.2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berrpikir.....	25
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan (pemerintah) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam melakukan manajemen perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk daerah. Selain itu juga menghasilkan suatu timbal balik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dilihat dari beberapa dekade ini, pemerintah telah menyadari pentingnya pembangunan sektor pendidikan nasional dan mulai memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan nasional. Hal tersebut didasari pada Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara harus mengalokasikan setidaknya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walaupun, terkadang pemerintah kesulitan untuk membagikan pengalokasian dana tersebut karena harus menyeimbangkan antara amanat konstitusi dengan kondisi beban cicilan dan bunga utang yang terdapat dalam APBN yang relatif besar.

Dalam pasal 309 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara.” Dijelaskan pula pada pasal 12 UU tersebut bahwa, “Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal

111 ayat (2) meliputi: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, (e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat dan (f) Sosial”. Sehingga, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk membangun sektor pendidikan di Indonesia, selain memerlukan peran yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, diperlukan pula peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperlancar pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD setiap sektor pemerintahan perlu adanya akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian manajemen di setiap kegiatan pusat pertanggungjawaban (Sukirno, 2015). Akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya (Hidayat, 2012).

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab (Syahrul, 2018). Setiap manajer diberikan peran untuk mencapai sebagian sasaran perusahaan dan memungkinkan pelaksanaan peran, kepada setiap manajer yang diberikan peran

dialokasikan sebagai sumber daya yang harus diukur dengan satuan uang.

Akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen, karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan (Sriwidodo, 2010). Pengendalian dapat dilakukan dengan cuma memberikan tanggung jawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya dan berusaha mengajukan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut di bawah pengendaliannya. Dengan demikian anggaran harus disusun untuk setiap pusat pertanggungjawaban, yang dibebani tanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Disamping itu melalui realisasi dari setiap pusat pertanggung jawaban dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat ditentukan selisih (*Variance*) dan anggaran. Selanjutnya selisih ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai prestasi manajer dari setiap pusat pertanggungjawaban.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan memerlukan penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana yang dinyatakan dengan angka-angka moneter yang biasanya mencakup jangka waktu satu tahun. Dengan adanya anggaran perusahaan dapat mengukur berbagai nilai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Penyusunan anggaran didasarkan atas rencana kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan kemudian realisasi anggarannya akan dilaporkan secara periodik untuk digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja karyawan. Selain penyusunan anggaran, penerapan akuntansi pertanggungjawaban juga dituntut adanya struktur organisasi yang jelas dan tegas, hal ini penting karena menyangkut kejelasan pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan serta

menciptakan pusat pertanggungjawaban.

Pengendalian manajemen dibutuhkan untuk menghindari tindakan penyimpangan biaya operasional. Pengendalian manajemen itu sendiri lebih terfokus pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi alat untuk menjalankan strategi dan semua program-program yang telah dirancang demi mewujudkan suatu organisasi pemerintahan yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Salah satunya setiap unit organisasi harus adanya pemisah antara tugas dan wewenang dalam beberapa bagian sebagai pelaksana program dan sebagai perancang anggaran. Kemudian pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana program harus sesuai dengan realisasi yang sudah terpakai dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban selalu menetapkan target-target operasional dan anggaran. Dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, seorang pemimpin pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan menggunakan biaya secara efisien.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng merupakan suatu instansi yang bergerak pada pelayanan publik dalam bidang pendidikan dan Olahraga. Sebagai instansi jasa pelayanan publik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng bertanggungjawab atas pengelolaan biaya dan penyusunan anggaran APBD.

Upaya anggaran yang digunakan dapat tercapai pada indikator yang diharapkan perlu adanya pengendalian yang tepat. Selain itu, perlu adanya pematangan penyusunan anggaran yang diperlukan untuk mencapai biaya operasional yang dibutuhkan. Dengan demikian agar Dinas Pendidikan memperoleh suatu dana dan prestasi yang lebih meningkat perlu disusunnya suatu laporan pertanggungjawaban yang bisa dipercaya kebenaran dan kewajarannya melalui berbagai tahap perencanaan dan pemisahan wewenang yang dibutuhkan oleh organisasi pengendalian.

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi besar yang dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dipecah menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas. Pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD lalu menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan.

Penelitian ini tentang akuntansi pertanggungjawaban yang ada di sektor publik, khususnya pemerintahan daerah yang masih sangat luas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat dan mengetahui bagaimanakah akuntansi pertanggungjawaban di pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.”

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian tentang Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban dapat memberikan sumbangan teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi dan diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, penggunaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dapat menambah wawasan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau pihak

manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan tema penulisan ini dimasa yang akan datang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Terdapat struktur organisasi yang jelas menerapkan wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen, proses penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan kantor selama 1 tahun, tidak ada pemisahan biaya terkendali ataupun tidak terkendali karena pada sistem pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah menginput biaya sesuai dengan kebutuhan dari operasional, adanya klasifikasi kode rekening, serta sistem pelaporan biaya sebagai syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu pihak keuangan kantor dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sebaiknya melengkapi format laporan pertanggungjawaban. Menjelaskan penyimpangan biaya bulan ini dan menjelaskan penyimpangan biaya sampai bulan ini pada laporan pertanggungjawaban, agar apabila terjadi penyimpangan, dapat langsung mengetahui mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas penggunaan biaya-biaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani et.al., 2017. *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi*. Vol.7
- Hidayat.T Dan Tin.s. 2012. *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di Warung Paskal Bandung*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.2
- Lintong.et.al. 2017. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah kota Moberu*. Vol.6
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaa Keuangan Daerah.
- PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Pramitari,et.al. 2014. *Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Penilaian Kinerja Karyawan Pada UD.Sangging Serasi, Tabanan*. Vol.4
- Rahmawati.et.al. 2017. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial PT.KAI Persero Daop VII Madiun*. Vol.5 No.1
- Sondakh.J.J dan Mentu.E.P. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas*

Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.4 No.1

Sriwidodo, Untung. 2010. *Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi. Vol.8 No.1*

Sukirno. 2005. *Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Program Diploma III WATES, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol.IV No.2*

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Zwingly The. et.al., 2016. *Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. Vol.16 No.4*